

**EVALUASI AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN  
KEUANGAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI**

**DI KOTA PADANG**

**TUGAS AKHIR**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sains Terapan  
pada Jurusan Akuntansi Program Studi Akuntansi Pemerintahan

Oleh:

**OKURPAYETIS**

**06096050**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI PEMERINTAHAN  
JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2009**

No. Alumni Univesitas	Okurpayetis	No. Alumni Fakultas
a). Tempat/Tgl. Lahir: Tapan, 09/10/1982 b) Nama Orang Tua: Awaluddin dan Afrida c) Fakultas: Politeknik Negeri Padang d) Jurusan: Akuntansi e) NIM: 06086059 f) Tgl Lulus: 30 Juli 2009 g) Predikat Lulus Memuaskan h) IPK: 2,64 i) Lama studi: 32 bulan k) Alamat orang tua: Jln. Lintas Bengkulu samping Mushalla Nurul Yaqin Simpang 3 Tj Pondok Tapan Pesesir Selatan		

**Evaluasi Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri di Kota Padang**

Tugas Akhir DIV oleh Okurpayetis. Pembimbing: 1). Zahara, SE, M.Ak, Ak 2). Ulf Maryati, SE, M.Ak, Ak

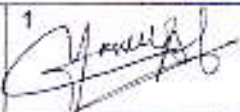
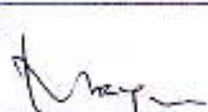

**ABSTRAK**

Sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang no 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan, pendidikan merupakan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan merupakan tuntutan undang-undang sekaligus tuntutan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan SMAN di Kota Padang, penelitian ini dilakukan dengan cara penyebaran kuisioner. Sampelnya penelitian terdiri dari SMAN 1, SMAN 9, SMAN 10 dan SMAN 14 Padang. Kuisioner diberikan kepada Kepala Sekolah, bandahara, guru, komite dan siswa (Osis), yang masing-masing sekolah di sebarakan kuisioner sebanyak 20 kuisioner/sekolah. Adapun aspek yang diuraikan dalam kuisioner adalah pengukuran akuntabilitas, pengukuran transparansi, peran sekolah dan komite sekolah, penyajian dan pengguna informasi dalam laporan RAPBS dan sarana dan proses pembukuan penyusunan RAPBS. Nilai rata-rata dari 4 sekolah SMAN 1 adalah 3,42 yang termasuk dalam kriteria sangat akuntabel dan sangat transparan, SMAN 9 nilai rata-rata 2,64 termasuk kriteria akuntabel dan transparan, SMAN 10 nilai rata-rata 2,45 termasuk kriteria cukup akuntabel dan cukup transparan dan SMAN 14 nilai rata-rata 2,92 termasuk kriteria akuntabel dan transparan. Secara keseluruhan nilai rata-rata 4 sampel adalah 2,83 yang termasuk dalam kriteria akuntabel dan transparan. Sehingga dapat disimpulkan pengelolaan keuangan sekolah ke 4 sekolah yang diteliti sudah akuntabel dan transparan.

Skripsi telah dipertahankan didepan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 30 Juli 2009

Abstrak telah disetujui oleh penguji:

Penguji:

Tanda Tangan	1 	2 	3	4 
Nama Terang	Yossi Septriani, SE, M Acc. Ak	Anda Dwi Hahiadi, SE, Ak	Wiwik Andriani, SE, Ak	Zahara, SE, M, Ak, Ak

Mengetahui:

Ketua Jurusan Nurul Fauzi, SE, MM, Ak  
Nama

  
Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas Andalas dan mendapat Nomor Alumnus:

	Petugas Fakultas/ Universitas	
Nomor alumni Fakultas:	Nama	Tanda Tangan
Nomor alumni Universitas:	Nama	Tanda Tangan

## BAB SATU

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, pendidikan merupakan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat. Pengelolaan kepercayaan publik dalam bidang pendidikan sangat terkait dengan perlunya menciptakan proses dan manajemen yang menjamin bahwa sumber daya publik digunakan sebagaimana mestinya. Proses dan manajemen tersebut memerlukan pengelolaan yang baik (*good governance*). Dengan terciptanya *good governance*, diharapkan terwujud efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.

Dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya, guru sebagai profesi menyanggah persyaratan tertentu sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam pasal 39 (1) dan (2) dinyatakan bahwa kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

Akuntabilitas dan transparansi merupakan komponen tata kelola yang baik (*good governance*). Akuntabilitas dan transparansi merupakan dua komponen yang saling mendukung dan melengkapi. Akuntabilitas pelayanan publik dimaksudkan sebagai kemampuan para pejabat publik memberikan penjelasan atas penyelenggaraan pelayanan yang menjadi tanggung jawabnya. Transparansi pelayanan publik dimaksudkan sebagai ketersediaan akses bagi para pemangku kepentingan

(*stakeholders*) untuk memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pelayanan publik tersebut.

Dalam Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintah (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 1 paragraf 22-23 menempatkan akuntabilitas sebagai tujuan utama pelaporan keuangan organisasi pemerintah. Ini karena penyelenggara pelayanan serta pengendalian atas penggunaan sumberdaya keuangan merupakan aspek terpenting yang harus dapat dipertanggungjawabkan oleh organisasi pemerintah. Dan dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka membawa suatu perubahan sistem pemerintahan dari sistem sentralisasi menjadi desentralisasi. Dan dalam bidang keuangan, terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara merupakan perwujudan reformasi di bidang keuangan negara.

Pengelolaan keuangan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan tersebut mengatur pokok-pokok kewenangan pengelolaan keuangan daerah, perbendaharaan dan pemeriksaan keuangan daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 merupakan *omnibus regulation*, yakni peraturan perundangan yang memuat ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004. Pelaksanaan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 di daerah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah, yang disusun dengan berpedomankan

pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 memuat secara terperinci sistem dan prosedur pengelolaan keuangan, yang meliputi perencanaan dan penganggaran, penatausahaan APBD, serta akuntansi dan pelaporan.

Adanya reformasi di bidang keuangan sebagaimana dijelaskan, membawa perubahan pula dalam pengelolaan keuangan di bidang pendidikan. Khususnya untuk sekolah dasar dan menengah, pengelolaan keuangan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah yang berpedomankan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Keterlibatan masyarakat dalam dewan pendidikan dan komite sekolah dalam pengelolaan keuangan sekolah dimaksudkan agar tercipta situasi partisipatif serta mendorong transparansi dan akuntabilitas horizontal. Dewan pendidikan merupakan badan mandiri yang berkedudukan sebagai mitra sejajar dengan kepala daerah dan DPRD dalam pengelolaan pendidikan di tingkat kabupaten/kota. Komite sekolah merupakan badan mandiri yang berkedudukan sebagai mitra sejajar sekolah. Dengan struktur yang mandiri dan sejajar tersebut, dewan pendidikan dan komite sekolah merupakan saran untuk memberikan umpan balik sekaligus pengawasan oleh masyarakat sebagai pemangku kepentingan atas penyelenggaraan pendidikan.

Komite sekolah menjadi lembaga formal yang menjadi tempat saluran bagi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam penyelenggaraan pendidikan. Komite sekolah merupakan badan yang mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, yakni pemberi pertimbangan (*advisory agency*),

## BAB LIMA

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Dari proses penyebaran kuisioner dan pengolahan data yang dilakukan oleh peneliti di sekolah menengah atas (SMA) Nagari di Padang yang terdiri dari 16 sekolah Negeri, dan diambil sebagai sampel sebanyak empat sekolah yaitu SMAN 1, SMAN 9, SMAN 10, SMAN 14 Padang, dapat di simpulkan bahwa:

1. Akuntabilitas pengolahan keuangan SMAN 1, SMAN 9, SMAN 10 dan SMAN 14 Kota Padang pengelolaan keuangan sekolah telah dilaksanakan secara akuntabel.
2. Transparansi pengolahan keuangan SMAN 1, SMAN 9, SMAN 10 dan SMAN 14 kota Padang sudah dilaksanakan secara transparan.
3. Peran sekolah dan komite sekolah SMAN 1, SMAN 9, SMAN 10 dan SMAN 14 Padang dalam memonitor dan menjalani tugasnya sudah akuntabel dan transparan.
4. Penyajian dan penggunaan informasi dalam laporan RAPBS SMAN 1, SMAN 9, SMAN 10 dan SMAN 14 sudah akuntabel dan transparan.
5. Sarana dan proses pembukuan dalam penyusunan RAPBS SMAN 1, SMAN 9, SMAN 10 dan SMAN 14 sudah akuntabel dan transparan.

Jadi secara keseluruhan SMAN 1, SMAN 9, SMAN 10 dan SMAN 14, sudah mengelola keuangan sekolah secara akuntabel dan transparan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2007. *Prosedur Penelitian. Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Reneka cipta.
- Halim, A. (2002). "Akuntansi dan Pengendalian. Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah". Editor Abdul Halim. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- Harjono, Y (2007). "Kepsek Bukan Lagi 'Penguasa' Tunggal". [www.kompas.com](http://www.kompas.com), 2 Oktober 2007
- Jackson, P.M. (1982). *The Political Economy of Bureaucrazy*. Oxford : Philip Allan Publishers Limited.
- Komisi Standar Akuntansi Pemerintahan. (2005). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta : Salemba Empat.
- Lipham, James M. 1985. *The Principal Concepts, Competencies, and Cases*. New York: Longman Inc.
- Mardiasmo, (2003). "Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah". Yogyakarta : Penerbit Andi
- Mulgan, R (1997). "The Processes of Public Accountability". Australian Journal of Public Administration 56 (1) pp.25-36.
- Parwita, Diyah Desi. (2008). "Evaluasi Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Sekolah (Studi Kasus Pengelolaan Keuangan SMP Negeri di Kabupaten Bayumas)". Karya Akhir Program Studi Magister Akuntansi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Purnomo, S.H., (2005). "Mandulnya Komite Sekolah". [www.suaramerdeka.com](http://www.suaramerdeka.com), 19 Juni 2009
- Santosa. (2005). "Partisipasi Pembiayaan dan Efisiensi Penyelenggaraan Pendidikan (Studi pada Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Bayumas)". Thesis Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Sheiavo-Campo, S., and Tomasi, Daniel. (1999). "Managing Government Expenditure". Asia Development Bank, Manila.
- Sunaryanto, A. (2007). "Wajib Belajar Tak Sekedar Angka Partisipasi". [www.kompas.com](http://www.kompas.com) 8 Maret 2007.